

IMPLEMENTASI PROGRAM JADI PENGUSAHA MANDIRI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)

Nur Khofifah¹, Nurul Umi Ati², Suyeno³

*Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jalan
MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: nurkhofifah0399@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini berisi tentang bagaimana implementasi program kemiskinan Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Program ini berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat menjadi wirausaha muda dengan rentan usia 18 hingga 30 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek juga peran program Jadi Pengusaha Mandiri sebagai upaya mengurangi kemiskinan pada desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek serta faktor pendukung dan penghambat implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yakni pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (Conclusions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri pada desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek cukup baik dengan melalui tiga tahapan yakni 1) pendaftaran, 2) seleksi dan 3) pelatihan. Untuk peran program Jadi Pengusaha Mandiri sebagai upaya mengurangi kemiskinan di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dikatakan cukup berpengaruh baik dari segi ekonomi yang ditandai dengan adanya kenaikan penghasilan pada alumni program Japri, juga dari segi sosial dan pengalaman. Faktor pendukung pada implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri pada desa Bendorejo Kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Faktor penghambat implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri adalah masyarakat yang masih acuh terhadap program serta anggaran yang terbilang kurang untuk melanjutkan program Jadi Pengusaha Mandiri.

Kata Kunci : Implementasi, Jadi Pengusaha Mandiri, Kemiskinan.

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan tersebut, sudah melakukan beberapa program sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia seperti program Raskin (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan program-program lainnya. Kemiskinan terjadi bukanlah kehendak atau keinginan dari individu maupun kelompok masyarakat. Sejauh ini, suatu penduduk atau masyarakat dikatakan miskin apabila ditandai dengan rendahnya produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan

gizi atau kesejahteraan hidupnya menunjukkan ketidakberdayaan atau kurangnya sumber daya manusia dari segi Pendidikan baik formal ataupun nonformal.

Kasus kemiskinan sendiri bisa saja terjadi baik di daerah perkotaan ataupun desa, meskipun dalam hal ini kemiskinan lebih cenderung banyak ditemukan di daerah pedesaan, tanpa terkecuali Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek sendiri merupakan satu wilayah di Jawa Timur dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani ataupun nelayan. Kabupaten Trenggalek sendiri bukanlah wilayah Kabupaten/Kota tertinggal

di Jawa Timur, tetapi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek merupakan permasalahan yang tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Trenggalek mengeluarkan program sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dengan berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 yakni program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan). Program Gertak ini dibuat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Dalam implementasinya, program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) merupakan payung bagi beberapa program didalamnya seperti: program pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan juga akses sanitasi dan air bersih. Kemudian program sebagai upaya penanggulangan seperti Jadi Pengusaha Mandiri (Japri), KEPEL (Kelompok Peningkatan Ekonomi Lokal), Kredit Gangsar (Pedagang Pasar), Trenggalek GEMILANG (Gerakan Industri Cemerlang), Pengembangan Pertanian Terpadu, Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta program lain yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Semakin sulitnya masyarakat dalam mencari pekerjaan membuat pemerintah Kabupaten Trenggalek mengeluarkan program dibawah naungan Gertak untuk membina masyarakat guna menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, melalui program Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI) dengan pengharapan bahwa masyarakat Kabupaten Trenggalek dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Program Jadi Pengusaha Mandiri merupakan program dibawah naungan program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) pada poin Bina Ekonomi Rakyat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Trenggalek serta mampu mengurangi masalah kemiskinan seperti: tingkat pendidikan yang rendah, banyaknya pengangguran, buruknya generasi penerus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program 'Jadi Pengusaha Mandiri' terhadap masyarakat desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana peran program 'Jadi Pengusaha Mandiri' sebagai upaya mengurangi kemiskinan di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian program 'Jadi Pengusaha Mandiri' di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi program 'Jadi Pengusaha Mandiri' terhadap masyarakat desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui peran program 'Jadi Pengusaha Mandiri' sebagai upaya mengurangi kemiskinan di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program 'Jadi Pengusaha Mandiri' di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pembaca:
 1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi program Gertak yakni program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kabupaten Trenggalek.
 2. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti yang lain apabila melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- b. Bagi Peneliti:
 1. Memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah untuk digunakan dalam penelitian.
 2. Sebagai sebuah ajang untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis suatu masalah.
- c. Bagi Pihak Pelaksana Program
 1. Sebagai bahan evaluasi mengenai implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kabupaten Trenggalek.
 2. Sebagai bahan rujukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan baru terkait

pelaksanaan program Jadi Pengusaha Mandiri di Kabupaten Trenggalek.

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Implementasi

Secara umum implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat atau matang. Menurut Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004:65) implementasi biasanya berkaitan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu badan atau lembaga guna menacapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart memaknai implementasi yakni pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan sebuah kebijakan atau program-program (Budi Winarno, 2014:147). Sedangkan menurut Edward III (1980:1) menegaskan bahwa Implementasi kebijakan merupakan sebuah keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif dan keluarnya sebuah putusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya (Yulianto Kadji, 2015:47).

2.3 Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor-faktor tertentu yang mana saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikemukakan Edward III. George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2015:90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel yakni: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Selanjutnya Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dikutip dari Subarsono (2015:99) menyatakan bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni: standard an sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta disposisi implementator.

2.4 Konsep Public Privat Partnership

Public Private Partnership (PPP) atau biasa disebut dengan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) menurut Bappenas:2009 merupakan kerjasama dalam

penyediaan infrastruktur seperti jalan tol, air minum ataupun energi listrik antara pemerintah, baik itu pemerintahan swasta atau pemerintahan daerah baik kabupaten/kota dengan badan swasta baik badan swasta dalam negeri ataupun badan swasta asing.

Sedangkan Parente (2006) dan Djunaedi (2007) berpendapat bahwa Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) diartikan sebagai sebuah kontrak atau kesepakatan antara pemerintah dengan pihak swasta dengan beberapa ketentuan seperti pihak swasta memegang Sebagian tugas dan fungsi pemerintah dalam jangka waktu tertentu (Didi,2019).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pelaksanaan Public Privat Partnership atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah-Swasta adalah terdapatnya *sharing* antara pemerintah dengan pihak swasta baik dalam bentuk investasi, tanggungjawab, resiko ataupun reward. Menurut UNDP dikutip dalam Hardianti:2019, pelaku Kerjasama Pemerintah-Swasta terdapat tiga unsur yaitu:

1. Negara, guna menciptakan lingkungan hukum dan politik ang kondusif.
2. Swasta, mendorong terciptaya lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta pendapatan bagi masyarakat.
3. Masyarakat, sebagai actor yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi social.

Tujuan pelaksanaan Public Privat Partnership (PPP) atau biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dikutip dari Hardianti (2019), adalah sebagai berikut:

- a. Guna mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengarahannya dana swasta.
- b. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan serta pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur.
- d. Medorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, ataupun dalam hal tertentu yang mempertimbangkan daya beli pengguna.

2.5 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan secara umum diartikan sebagai situasi atau kondisi individu ataupun kelompok yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang benar-benar sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kebutuhan hidup yang minimum. Seperti yang sudah dijelaskan diatas menurut Supriatna (1997:90) dalam Yulianto Kadji (2013) memaparkan tentang kemiskinan dengan menyatakan bahwa kemiskinan merupakan situasi

serba terbatas yang terjadi bukan atas permintaan orang yang bersangkutan. Sedangkan suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat Pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan ketidakberdayaan.

Sedangkan menurut Schiller (2007) dikutip oleh Soejadi (2001:19) kemiskinan merupakan ketidakanggupan untuk mendapatkan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan social terbatas (Marleni, 2012:48).

Menurut Kartasasmita (1993:4) dalam Yulianto Kadji (2013) masyarakat miskin menurut karakteristiknya umumnya lemah kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya dalam kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang potensi lebih tinggi.

Selanjutnya menurut Supriatna (1997:82) menegaskan mengenai lima karakteristik penduduk miskin, sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- 2) Tidak memungkinkan mendapatkan aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- 3) Tingkat pendidikan yang umumnya rendah.
- 4) Banyak diantara mereka yang umumnya tidak memiliki fasilitas.
- 5) Diantara mereka berusia relative muda dan tidak memiliki keterampilan ataupun Pendidikan yang memadai.

2.6 Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan

Berlandaskan UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki hak, wewenang untuk merencanakan, membuat atau merumuskan, mengimplementasikan ataupun mengevaluasi kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada masyarakat.

Program GERTAK tersebut dibuat bukanlah semata-mata hanya untuk mengentas kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, tetapi juga pemerintah Kabupaten Trenggalek ingin memberikan pesan moral kepada masyarakat mengenai penerimaan bantuan yang seringkali tidak tepat sasaran,

maksudnya apabila ada masyarakat mampu yang memperoleh bantuan kemiskinan diminta untuk sadar karena masih banyak masyarakat miskin lain yang lebih membutuhkan (Deny Ayu Aprilianingtyas, 2017:53).

Ada lima tahap dalam proses pengimplementasian program GERTAK oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek (Deny Ayu Aprilianingtyas, 2017:7) yakni:

- a. Golden Standart dan Klasifikasi,
- b. Mekanisme Mutasi
- c. Sistem Rujukan Terpadu atau Unit Pelayanan Terpadu
- d. Bina Ekonomi Masyarakat,
- e. Evaluasi

2.7 Program Jadi Pengusaha Mandiri

Bersamaan dengan program GERTAK yang dibentuk dengan berlandaskan UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dibentuk menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 maka lahirlah satu program didalam lingkup GERTAK yakni Jadi Pengusaha Mandiri.

Program Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI) ini merupakan salah satu program yang diwadahi oleh GERTAK dengan menekankan pada pelatihan kepada masyarakat khususnya anak muda dari keluarga yang tidak mampu tetapi memiliki pola pikir untuk berkembang (masyarakat produktif). Pelatihan yang dilakukan untuk program JAPRI merupakan pelatihan dan lokakarya kewirausahaan. Tidak hanya dalam bentuk pelatihan, program JAPRI juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta atau masyarakat yang dibina selama kurang lebih satu tahun guna memaksimalkan potensi bisnis yang dimiliki.

2.8 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Definisi peran menurut Soerjanto Soekanto (2002:243) dalam Agung Wijaya (2015) adalah aspek dinamis status (kedudukan), dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status atau kedudukannya. Sedangkan menurut Abu Ahmadi (1982) dalam Nina dan Mamay (2017) menyatakan bahwa peran adalah suatu kelompok pengharapan manusia atau dalam hal ini adalah masyarakat terhadap bagaimana individu harus bersikap berdasarkan dengan status dan fungsi sosialnya.

Dengan adanya hal tersebut peran dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang diharapkan oleh individu atau kelompok yang dalam hal ini berkaitan dengan masyarakat terhadap suatu permasalahan atau kondisi tertentu dengan status dan kedudukan tertentu pula.

Jika dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan maka pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan atau penyelenggara negara untuk menjalankan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam hal penanggulangan kemiskinan peran pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah mengambil langkah dengan membuat program-program pengentasan kemiskinan yang efektif dan tidak tumpang tindih. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang mengeluarkan Program Jadi Pengusaha Mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dengan cara pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif*.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley menyatakan mengenai focus merupakan domain atau aspek penting tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi social (sugiyono:2005). Didalam penelitian kualitatif penentuan focus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat mutakhir informasi yang diperoleh dari situasi social atau lapangan.

Dalam hal ini focus penelitian merupakan hal yang ingin diteliti sehingga memudahkan peneliti merincikan bahasan yang akan diteliti, yakni:

1. Implementasi program Gertak 'Jadi Pengusaha Mandiri' di desa Bendorejo kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
2. Peran program Gertak 'Jadi Pengusaha Mandiri' sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
3. Faktor pendukung dan penghambat program Gertak 'Jadi Pengusaha Mandiri'

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Pada Penelitian ini, lokasi penelitian berada di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Peneliti memilih situs penelitian pada Posko program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan berada di Jalan Sunan Kalijogo No.2, Jonogaran, Ngantru, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur beserta dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.

3.4 Sumber Data

Sumber data utama kualitatif menurut Lofland (1984:47) dalam Moleong (2013:4) adalah kata-kata, tindakan dan yang selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung atau dari tangan pertama dari subjek penelitian. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan dari sumber-sumber primer atau biasa disebut dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini dapat berupa hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan maupun hasil dari wawancara dan melakukan tatap muka antara peneliti dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan dengan telaah peneliti yang berhubungan dengan pengimplementasian program Jadi Pengusaha Mandiri sehingga data sekunder tersebut bersifat penunjang dan melengkapi. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan, jurnal ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan program, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek serta data tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dan data-data penunjang lainnya.

3.5 Pengumpulan Data

Creswell (2009:266) merumuskan langkah-langkah dalam mengumpulkan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman telaah dokumen serta alat pendukung lainnya untuk melakukan kegiatan wawancara dan observasi, seperti: alat rekam, alat tulis, kamera dan lain-lain.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti yang berupa hasil wawancara, observasi dan juga dokumen kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif, dalam menginterpretasikan atau pemberian pendapat mengenai kegiatan implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri dalam penanggulangan kemiskinan di desa Bendorejo Kabupaten Trenggalek. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman yang dibagi menjadi beberapa tahap, yakni:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dari semua sumber, baik dari data primer maupun data sekunder. Selain itu, memindahkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menjadi bentuk transkrip serta memindahkan dokumen dalam bentuk deskriptif ataupun dalam bentuk tabel.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilih dan memilih kembali data yang telah dikumpulkan dan ditranskrip dengan memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting dan merangkum agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

c. Penyajian Data

Pada penelitian ini sesuai dengan teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Kemudian pembahasan lebih mendalam mengenai penelitian implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya masih bersifat remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kemudian kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini bertujuan untuk mencari data baru yang lebih mendalam dengan persetujuan bersama guna menjamin validitasnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri Terhadap Masyarakat Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Dengan berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek membuat suatu program sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di

Kabupaten Trenggalek termasuk pada desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Program tersebut adalah Jadi Pengusaha Mandiri atau biasa disebut dengan JAPRI, dimana program ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek pada bagian VII dengan misi “Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah”, dengan tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, dengan sarannya adalah meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Dalam pelaksanaannya program Jadi Pengusaha Mandiri melalui beberapa tahap yakni:

a. Pendaftaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam pengimplementasian program Jadi Pengusaha Mandiri tahap awal yang dilalui adalah pendaftaran. Program Japri sendiri sudah menetapkan standar dari sasaran program Jadi Pengusaha Mandiri yakni masyarakat muda berusia mulai dari 18 hingga 30 tahun, dengan menyerahkan data diri sebagai syarat administratif seperti KTP, Kartu Keluarga atau bahkan surat rekomendasi dari desa atau kecamatan.

b. Seleksi

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti proses seleksi program Jadi Pengusaha Mandiri dilakukan pada beberapa tahap dimulai dari tahap administrasi, kemudian pada tahap Business Motivation Work (BMW) dimana peserta diberikan bekal penggalan ide usaha, selanjutnya Business Model Canvas (BMC) yang bersifat praktik dimana peserta dituntut untuk membuat rencana usaha mereka dengan berdasarkan form yang telah diberikan dan berlanjut pada mentoring dan coaching, yang mana pada setiap tahapan tersebut peserta diberikan pelatihan sekaligus dengan seleksi secara bersamaan.

c. Pelatihan

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada proses pelatihan yang terlaksana pada program Jadi Pengusaha Mandiri yakni terdapat tiga tahapan yang hampir sama pada proses seleksi yaitu BMW (Business Motivation Work), BMC (Business Model Canvas) serta Mentoring dan Coaching. Pada tahap pelatihan, para peserta juga diberikan bantuan modal untuk bisnis atau usaha mereka dengan tetap diberikan pengawasan terhadap kemajuan dari usaha mereka dengan menggunakan pendampingan secara

langsung juga dengan menggunakan pelaporan dengan mengisi form yang tersedia.

4.2 Peran Program Gertak Jadi Pengusaha Mandiri sebagai Upaya Angka Kemiskinan di Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, program Jadi Pengusaha Mandiri berpengaruh pada masyarakat termasuk pada alumni program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Pengaruh program Jadi Pengusaha Mandiri ini bukan hanya sebatas pencapaian omset alumni yang berubah setelah mengikuti program Japri dan juga ilmu yang diterapkan dalam berwirausaha, tetapi juga kualitas hidup dari alumni yang telah mengikuti program Jadi Pengusaha Mandiri tersebut. Kualitas hidup yang dimaksud adalah para alumni atau masyarakat yang pernah mengikuti program Jadi Pengusaha Mandiri adalah menjadi pribadi yang berani mencoba hal-hal baru khususnya dalam dunia usaha dengan bekal ilmu yang telah diberikan pada saat pelatihan program Jadi Pengusaha Mandiri, juga para peserta bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Jadi Pengusaha Mandiri

1. Faktor Pendukung Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri

a. Komunikasi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi pada pelaksanaan program Jadi Pengusaha Mandiri sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penyampaian informasi mengenai program Jadi Pengusaha Mandiri dari Prestasi Junior Indonesia selaku implementator kepada para aparat pemerintah khususnya di tingkat kecamatan, yang kemudian diteruskan kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek termasuk pada desa Bendorejo Kecamatan Pogalan.

b. Sumber Daya

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, sumber daya merupakan faktor yang sangat penting. Sumber daya disini tidak hanya berupa sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lain yang juga menunjang pelaksanaan program. Dalam proses implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri, implementator memanfaatkan sumberdaya dengan baik dibuktikan dengan para aparat atau implementator yang menjalankan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing, bekerjasama dan berjalan secara beriringan sesuai dengan tugas masing-

masing. Tidak hanya itu, terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang program juga disediakan.

c. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan suatu program merupakan aspek penting yang menunjang pelaksanaan atau implementasi program. Disposisi merupakan watak dan komitmen yang dimiliki oleh oleh implementator. Berdasarkan dengan pengamatan, disposisi para implementator dilakukan dengan cukup baik melihat komitmen implementator dalam menjalankan program mulai dari proses penginformasian program kepada aparat ataupun para peserta, dilanjutkan kepada proses pendaftaran, seleksi dan pelatihan dimana para implementator memberikan pendampingan kepada para peserta program.

d. Struktur Birokrasi

Aspek lain yang menjadi faktor pendukung dalam program Jadi Pengusaha Mandiri adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi sendiri menyangkut SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada pada organisasi atau instansi yang berperan sebagai implementator. Dari hasil pengamatan yang dilakukan tidak ada SOP tertulis dari Prestasi Junior Indonesia (PJI) selaku implementator. Hal tersebut dikarenakan program Japri merupakan program Konsorsium atau program yang diimplementasikan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi ataupun instansi. Dari hasil wawancara yang dilakukan implementator yakni PJI memberikan keterangan bahwa dalam pengimplementasian program Japri tetap menggunakan SOP dari masing-masing organisasi dan instansi.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri

a. Masyarakat yang acuh

Berdasarkan dengan pengamatan yang dilakukan, hal yang menjadi penghambat adalah masih banyaknya masyarakat yang acuh terhadap program yang ada. Menurut keterangan dari Bapak Akbar Novianto bahwa kebanyakan masyarakat lebih mengharapkan bantuan berupa fresh money daripada harus melalui proses yang panjang seperti program Jadi Pengusaha Mandiri yang melakukan pelatihan selama kurang lebih selama 1 tahun. Tetapi meskipun demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang memiliki antusias untuk mengikuti program Japri.

b. Anggaran

Pada pelaksanaan program Jadi Pengusaha Mandiri anggaran merupakan faktor yang juga sangat mendukung pelaksanaan program. Mengingat

program Japri merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian modal kepada peserta. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Akbar Novianto bahwa pendanaan program Japri sepenuhnya berasal dari USAID. Sehingga setelah program berhenti, pemerintah membutuhkan sinergi baru untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat ini dengan tetap disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah daerah lainnya.

Kesimpulan

1. Implementasi Program Jadi Pengusaha Mandiri Terhadap Masyarakat Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan implementasi peraturan daerah Kabupaten Trenggalek dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan dengan menggunakan tolak ukur Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Program Jadi Pengusaha Mandiri terlaksana cukup baik, hal tersebut di dibuktikan terlaksananya tahapan dalam implementasi program yakni mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pada proses pelatihan. Selain itu, terdapat beberapa pelatihan seperti Business Motivation Work (BMW), Business Model Canvas (BMC) dan juga Mentoring dan Coaching.

Program Jadi Pengusaha Mandiri merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dengan pihak swasta yakni USAID dan Pretasi Junior Indonesia. Dimana dalam pengimplementasian program saling bekerjasama dengan pemerintah sebagai fasilitator yang mendukung kebijakan dan menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif, kemudian USAID dan Prestasi Junior Indonesia sebagai pendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat dan pendapatan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat yang mengikuti program, serta masyarakat yang menjadi target sasaran program yang berpartisipasi dalam implementasi program.

2. Peran Program Jadi Pengusaha Mandiri Sebagai Upaya Angka Kemiskinan di Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan peran program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah

program yang diimplementasikan kepada masyarakat tentunya membawa dampak atau pengaruh kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa sumber maka program Jadi Pengusaha Mandiri berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam segi ekonomi dan social. Selain bisa menaikkan omset karena para peserta mendapatkan ilmu bagaimana penggalan ide usaha, bagaimana pencatatan keuangan yang baik dan benar, peserta juga merasakan dalam segi social dimana bertambahnya relasi para peserta dalam menjalankan usahanya. Peserta juga dapat menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Jadi Pengusaha Mandiri

Berdasarkan dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri di desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek antara lain adalah:

1. Faktor pendukung implementasi: komunikasi yang mendukung program Jadi Pengusaha Mandiri yang dibuktikan dengan pemberian informasi mengenai program kepada para aparat yang diteruskan kepada masyarakat, sumber daya yang dimana dalam implementasi program Jadi Pengusaha Mandiri mengandalkan orang-orang yang kompeten dalam menjalankan tugas pokoknya, disposisi yang dibuktikan dengan komitmen para implementator dalam menjalankan program mulai dari pendaftaran hingga pada tahap pelatihan, struktur birokrasi yang dibuktikan dengan pelaksanaan program dengan berdasarkan standar operasional masing-masing organisasi dan instansi yang terkait.
2. Faktor penghambat implementasi: masih banyaknya masyarakat yang acuh terhadap program pemerintah dan lebih memilih untuk mendapatkan bantuan secara instan dibandingkan mengikuti proses pelatihan program Jadi Pengusaha Mandiri dengan kurun waktu kurang lebih selama 1 tahun, yang kedua adalah anggaran yang terbatas dari pemerintah sehingga membutuhkan strategi baru dalam menerapkan program Jadi Pengusaha Mandiri kedepannya, karena sebelumnya pendanaan ditanggung oleh USAID.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Sadewo, FX Sri dkk (Ed.). 2007. *Masalah-Masalah Kemiskinan di Surabaya*. Surabaya: UNESA University Press
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Trenggalek Dalam Angka 2015*. Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kecamatan Pogalan Dalam Angka 2015*. Trenggalek: BPS Kabupaten Trenggalek.

B. DOKUMEN-DOKUMEN

- Pemerintah Indonesia(2015) *Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek(2018) *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*. Trenggalek, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
- Pemerintah Indonesia (2015) *Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2017. *Jurnal Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)*. Trenggalek, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kabupaten Trenggalek. Posko Gertak.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2018. *Jurnal Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskina)*. Trenggalek, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek. Posko Gertak.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2019. *Jurnal Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)*. Trenggalek, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek. Posko Gertak.

C. Jurnal dan Skripsi

- Moeh. Yafie Abbas. 2018. *Public Privat Partnership Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Suncitiy Plaza Sidoarjo*. Hlm: 1-9
- Deny HA. 2017. *Rural Poverty Imlplementasi Program Gerakan Tengok Bawah masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten TREnggalek*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Malang: Malang.
- Nina Herlina, Mamay Komariah. 2017. *Peran Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis*. Vol. 5, No. 2 (hlm 260-277)
- Moch. Aldino. 2018. *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta.
- Hardianti Somp. 2019. *Public Privat Partnership Dalam Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

D. INTERNET

- jatim.antaranews.com diakses pada 16 Desember 2019. Pukul 19.07 WIB